PEMERINTAH
KOTA CILEGON

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KUA 2024

KOMPLEK SUKMAJAYA MANDIRI, JL. AHMAD YANI, SUKMAJAYA, KEC. JOMBANG, KOTA CILEGON, BANTEN 42416 TLP (0254) 392 967

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur patut kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nyalah Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024 telah selesai disusun. KUA Kota Cilegon Tahun 2024 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon serta Permendagri No 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, akan menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024. KUA 2024 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021- 2026.

Demikian kata pengantar ini, kami mengharapkan tanggapan dan saran yang membangun guna kesempurnaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kota Cilegon.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

Table of Contents

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN 7

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM – APBD TAHUN ANGGARAN 2024 7

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2024 8

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 .. 9

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 11

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 13

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 13

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 34

BAB III ASUMSI DASAR PENYUSUNAN R-APBD 2024 36

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN RAPBN 36

3.2 ASUMSI DASAR RAPBD PROVINSI 38

3.3 ASUMSI DASAR RAPBD KOTA CILEGON 39

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 44

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH 44

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 45

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 47

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA 47

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA 47

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 49

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 49

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 50

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 52

7.1 STRATEGI PADA MISI 1 MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL 52

7.2 STRATEGI PADA MISI 2 MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS 53

7.3 STRATEGI PADA MISI 3 MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN 54

7.4 STRATEGI PADA MISI 4 MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA 54
7.5 STRATEGI PADA MISI 5 MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERPERADABAN 55
BAB VIII PENUTUP 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Nilai Ekspor Indonesia, 2021-2023 15
Gambar 2.2 Kontribusi Ekspor per Sektor (Januari – Mei 2023) 15
Gambar 2.3 Kontribusi Sektor PDRB ADHB Kota Cilegon Tahun 2022 19
Gambar 2.4 Kontribusi Sektor PDRB ADHB Kota Cilegon Tahun 2022 20
Gambar 2.5 Angka Pengangguran Terbuka Di Kota Cilegon Tahun 2018-2022 21
Gambar 2.6 Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kota Cilegon 22
Gambar 2.7 Urutan Tingkat Kemiskinan 22
Gambar 2.8 IPM Kota Cilegon Di Provinsi Banten Tahun 2022 24
Gambar 2.9 Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Cilegon Tahun 2018-2022 25
Gambar 2.10 Capaian Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se- Provinsi Banten Tahun 2022 25
Gambar 2.11 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Cilegon Tahun 2018- 2022 26
Gambar 2. 12 . Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2022 27
Gambar 2.13 Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Cilegon Tahun 2018- 2022 27
Gambar 2.14 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2022 28
Gambar 2.15 Perkembangan Daya Beli Masyarakat Cilegon 29
Gambar 2.16 Capaian Daya Beli Masyarakat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2022 (Ribu Rupiah/Tahun) .. 29
Gambar 2. 17 Indeks Gini Ratio 30
Gambar 2.18 Jumlah Penambahan Investasi PMA & PMDN tahun 2022 (dalam jutaan rupiah) 31
Gambar 2.19 Perbandingan Realisasi Investasi tahun 2022 di Provinsi Banten 32
Gambar 2.20 Laju Peningkatan Investasi Kota Cilegon 2017-2022 32
Gambar 2. 21 Perbandingan Inflasi Kota Cilegon dengan Nasional dan Provinsi Banten 33

Gambar 2.22 Inflasi Kota Cilegon berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2022 (YoY) 34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proyeksi Indikator Makro Perekonomian Daerah 19
Tabel 2. 2 Perkembangan Komponen IPM Kota Cilegon..... 24
Tabel 3.1 Sinkronisasi Prioritas RKP Pusat, RKPD Provinsi Banten dan RKPD Kota Cilegon Tahun 2024 42
Tabel 3.2 Proyeksi Ekonomi Makro Kota Cilegon 43
Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Kota Cilegon Tahun 2024..... 46
Tabel 5. 1 Rencana Belanja Daerah Kota Cilegon..... 48
Tabel 6. 1 Rencana Pembiayaan Daerah Kota Cilegon..... 50
Tabel 6.2 Ringkasan RAPBD Kota Cilegon Tahun 2024 51
Tabel 7.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1 Menghadirkan Pemerintahan Daerah Yang Profesional Dan Akuntabel 52
Tabel 7.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas 53
Tabel 7.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan 54
Tabel 7.4 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4 Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata 55
Tabel 7.5 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 5 Mewujudkan Masyarakat Berperadaban 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM – APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Tahapan awal perencanaan pembangunan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024 adalah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2024. Penganggaran merupakan tahapan selanjutnya dari proses perencanaan, dimana target kinerja yang sudah ditetapkan dalam proses perencanaan diturunkan dalam uraian tahapan dan kegaitan yang sudah berbasis output dan berbasis anggaran. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Proses penganggaran dimulai dengan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota Cilegon yang akan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cilegon Tahun 2024 berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2024. RKPD Kota Cilegon Tahun 2024 merupakan RKPD tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-

2026. RKPD Kota Cilegon Tahun 2024 mengusung tema pembangunan yaitu :

"MEMANTAPKAN KUALITAS SDM DAN DAYA SAING EKONOMI MENUJU CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT"

Selain berpedoman pada RKPD, dokumen KUA-PPAS juga mengacu pada kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. KUA ini menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 serta Rencana Kerja Anggaran Perangkat daerah (RKA-PD) Tahun anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Secara substansi, KUA memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, yang menjabarkan lebih lanjut tentang :

a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
b. Asumsi dasar penyusunan RKPD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator makro ekonomi daerah;
c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah;
e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2024 adalah untuk memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. KUA ini juga menjadi pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2024. Dengan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat

mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Dasar Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon;
20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon;
21. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Kebijakan Umum APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024 meliputi 5 bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan, tujuan penyususnan dan dasar (hukum) penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD

BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Menguraikan mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB III. ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBD

Menjelaskan tentang asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam perumusan dan penyusunan APBN dan APBD.

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Menjelaskan tentang kebijakan perencanaan pendapatan daerah serta target pendapatan daerah.

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Menjelaskan tentang kebijakan terkait perencanaan belanja daerah serta rencana belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer dan belanja tidak terduga.

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menjelaskan kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Menjelaskan tentang langkah konkret dalam mencapai target.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Global

Pemerintah memperkirakan ketidakpastian masih mewarnai perekonomian global di 2024. Setidaknya ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan yakni tensi geopolitik, arus digitalisasi, perubahan iklim, dan risiko pandemi.

Tensi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan memanasnya hubungan dagang Amerika Serikat-Tiongkok menyebabkan kebijakan negara-negara besar cenderung "inward looking". Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi, tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Kondisi ini akhirnya berimbas pada penurunan volume perdagangan global sehingga laju pertumbuhan ekonomi dunia terhambat.

Di samping itu, tekanan berat juga masih menghadang perekonomian global di tahun 2023 seperti laju inflasi global yang masih belum kembali ke level prapandemi sehingga suku bunga acuan global masih bertahan "higher for longer". Akibatnya, likuiditas global masih akan ketat sehingga 'cost of fund' juga masih tetap tinggi. Di sisi lain, ruang fiskal di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Gejolak perbankan di AS dan Eropa juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global.

Kendati cukup tertekan di 2023, perekonomian global diprediksi sedikit lebih meningkat di 2024 seiring normalisasi harga komoditas. Volume perdagangan juga diperkirakan meningkat dari 2,4 persen pada 2023 menjadi 3,5 persen pada 2024. Dengan prospek ekonomi yang membaik, kinerja ekspor pada tahun depan diharapkan dapat kembali menguat.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2022 akan mencapai 3,4% dan tumbuh melambat menjadi 2,9% pada 2023. Kemudian meningkat menjadi 3,0% pada 2024.

Pemerintah optimistis produk-produk hilirisasi lanjutan juga dapat menopang daya saing produk ekspor Indonesia. Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi diperkirakan akan menguat pada 2024. Hal itu sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat, inflasi yang terkendali, dan meningkatnya penciptaan lapangan kerja. Penyelenggaraan pemilu

dan pilkada serentak juga diekspektasi akan turut mendorong aktivitas perekonomian.

B. Arah Kebijakan Ekonomi Global

Ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga meskipun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,0% (yoy). Pertumbuhan ekonomi terus di atas 5% dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang menurun utamanya karena keberhasilan pemerintah dalam menurunkan inflasi bahan pangan. Tingkat inflasi tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada bulan April 2023.

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Sementara itu, indikator dini lainnya juga menunjukkan tren yang relatif kuat. Di tengah menguatnya fondasi ekonomi domestik serta membaiknya prospek pertumbuhan ekonomi global, pemerintah mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada di kisaran 5,3-5,7%.

Selain itu, BPS mengumumkan bahwa ekspor Indonesia pada Mei 2023 naik 12,61 persen dibanding April 2023, yaitu dari US$19.284,1 juta menjadi US$21.716,3 juta. Demikian juga jika dibanding Mei 2022, ekspor naik 0,96 persen. Ekspor nonmigas Mei 2023 mencapai US$20,40 miliar, naik 13,18 persen dibanding April 2023, demikian juga naik 1,94 persen jika dibanding ekspor nonmigas Mei 2022. Peningkatan ekspor Mei 2023 dibanding April 2023 disebabkan oleh meningkatnya ekspor nonmigas 13,18 persen dari US$18.025,4 juta menjadi US$20.401,3 juta, demikian juga ekspor migas naik 4,48 persen, yaitu dari US$1.258,7 juta menjadi US$1.315,0 juta. Peningkatan ekspor migas disebabkan oleh meningkatnya ekspor minyak mentah 91,89 persen menjadi US$171,9 juta dan ekspor gas 9,40 persen menjadi US$729,9 juta, sementara ekspor hasil minyak turun 17,67 persen menjadi US$413,2 juta. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia periode Januari–Mei 2023 mencapai US$108,06 miliar atau turun 6,01 persen dibanding periode yang sama tahun 2022, sementara ekspor kumulatif nonmigas mencapai US$101,48 miliar atau turun 6,69 persen.

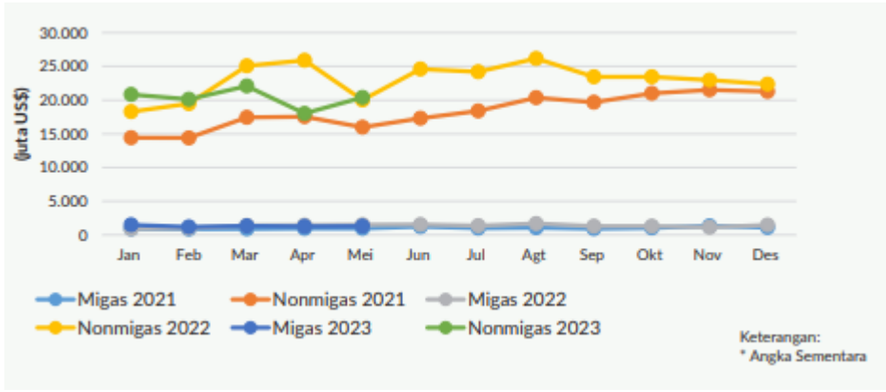

Gambar 2.1 Nilai Ekspor Indonesia, 2021-2023

Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Mei 2023 turun 8,97 persen dibanding periode yang sama tahun 2022, demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 3,95 persen, sedangkan ekspor hasil pertambangan dan lainnya naik 1,36 persen. Ekspor nonmigas Mei 2023 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$4,78 miliar, disusul Amerika Serikat US$2,05 miliar dan Jepang US$1,77 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 42,12 persen. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar US$3,97 miliar dan US$1,56 miliar.

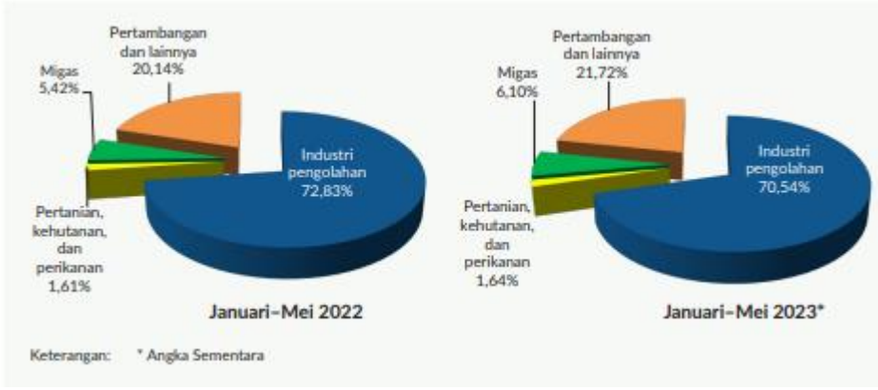

Gambar 2.2 Kontribusi Ekspor per Sektor (Januari – Mei 2023)

C. Arah Kebijakan Ekonomi Regional

Kondisi perekonomian tahun 2023 dan tahun 2024 diproyeksikan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini ditunjukan dengan sudah tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2022 dan sudah mencapai 5%. Selain itu berbagai lembaga internasional seperti *World Bank, International*

Monetary Fund (IMF), *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) memperkirakan ekonomi global pada 2023 akan tumbuh pada kisaran 5%. Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di tingkat global, regional serta nasional dan melihat perkembangan pandemi covid-19 maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten diproyeksikan dapat mencapai kisaran 5,3-5,5. (Sumber : Rancangan Awal RKPD Banten Tahun 2023). Proyeksi tersebut berdasarkan asumsi antara lain :

Pertama, Perluasan tingkat vaksinasi di Provinsi Banten menjadi faktor pemulihan utama yang mendorong optimisme dan mobilitas masyarakat. Daya beli masyarakat diperkirakan terus menguat sering perbaikan prospek pendapatan masyarakat pada tahun 2023. Berbagai stimulus yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah salah satunya melalui Bantuan Sosial yang diperkirakan dapat menjadi pendorong pertumbuhan komponen ini akan berlanjut pada tahun 2022;

Kedua, Dari sisi Lapangan Usaha (LU), empat sektor utama PDRB Provinsi Banten yaitu industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan *real estate* diproyeksikan tumbuh dengan baik dan berangsur pulih tumbuh seperti pada masa sebelum adanya Covid-19. Industri pengolahan di Provinsi Banten yang mayoritasnya berorientasi ekspor akan tumbuh seiring dengan normal kembalinya perdagangan nasional maupun internasional. Begitu pun dengan perdagangan, berbagai peraturan pembatasan yang semakin melonggar akan memungkinkan tumbuhnya sektor perdagangan baik perdagangan besar maupun perdagangan eceran;

Ketiga, Dari sisi pengeluaran, PDRB Provinsi Banten diproyeksikan dapat tumbuh dengan baik karena semakin normalnya aktivitas masyarakat sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga pun akan berangsur pulih bahkan tumbuh dengan baik. Dari sisi investasi, pulihnya ekonomi dunia secara berangsur akan membuat para investor kembali menanamkan modalnya di Banten baik PMDN maupun PMA. Selain itu kegiatan ekspor impor juga akan menjadi salah satu penyumbang tumbuhnya perekonomian Banten karena perdagangan internasional sudah berangsur pulih.

Perekonomian Provinsi Banten melanjutkan pertumbuhan positif pada triwulan iii 2022 dengan mencatatkan angka pertumbuhan

sebesar 5,71% (yoy) atau sebesar 0,50% (qtq) sedikit di bawah perekonomian jawa (5,75% yoy) maupun nasional (5,72 yoy). pertumbuhan ekonomi banten tersebut dari sisi penawaran didukung perbaikan berbagai sektor utama penopang perekonomian banten. sementara itu, dari sisi permintaan, keyakinan masyarakat akan kondisi perekonomian dan mobilitas yang semakin kuat, menjadi key driven berlanjutnya pertumbuhan ekonomi banten yang sudah mulai semakin jelas arahnya sejak awal tahun 2022.

Tekanan harga di Provinsi Banten sepanjang triwulan III 2022 menunjukan peningkatan dengan mencatatkan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 5,86% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,62% (yoy). Meskipun laju invlasi Provinsi Banten tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi Nasional (5,95%), namun laju inflasi tersbut lebih tinggi dibandingkan regional Jawa yang tercatat sebesar 5,61% (*yoy*). Secara spasial, inflasi Provinsi Banten pada triwulan III 2022 terjadi pada seluruh kota sampel IHK di Provinsi Banten dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Serang sebesar 7,53% (*yoy*) diikuti oleh Kota Cilegon sebesar, 80% (*yoy*) dan Kota Tangerang sebesar 5,40% (*yoy*).

Stabilitas sektor keuangan di Provinsi Banten sepanjang triwulan III 2022 tetap terjaga dengan baik untuk mendukung pemulihan ekonomi. Intermediasi sektor perbankan berjalan dengan baik walaupun pertumbuhan beberapa indikator perbankan tidak setinggi pertumbuhan pada triwulan II 2022. Kredit sektor perbankan juga menunjukkan peningkatan, dimana berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Banten pada triwulan III 2022 tercatat tercatat Rp415,27 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 10,48% (*yoy*). Secara nominal, Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Banten juga menunjukkan peningkatan, dimana sampai dengan triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp251,54 triliun atau tumbuh sebesar 9,92% (*yoy*). Sementara itu, aset perbankan di Provinsi Banten pada triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp 286,23 triliun atau tumbuh sebesar 9,99% (*yoy*).

Melihat dinamika perekonomian sampai sejauh ini, pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tahun 2022 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Membaiknya pertum buhan ekonomi Banten tahun 2022 tersebut juga sejalan dengan progress vaksinasi yang mendorong peningkatan mobilitas masyarakat

serta Konsumsi Rumah Tangga, Investasi baik swasta maupun Pemerintah, serta peningkatan kinerja ekspor baik antar daerah maupun luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2022 diprakirakan akan berada pada kisaran 4,8% - 5,6%. Namun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tersebut di sisi lain juga diperkirakan akan mendorong kenaikan tekanan inflasi pada tahun 2022, dimana inflasi Provinsi Banten 2022 diperkirakan akan melampaui batas atas target inflasi yang ditetapkan pemerintah yaitu di kisaran 3,0±1% (*yoy*).

D. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Basis dari perekonomian kota Cilegon adalah pengolahan dari bahan dasar menjadi bahan setengah jadi, dua sektor paling dominan di Kota Cilegon adalah industri pengolahan logam dan industri pengolahan kimia, kedua sektor tersebut memiliki kontribusi sebesar 55.32 persen dari seluruh PDRB kota Cilegon pada tahun 2021. Meskipun kondisi perekonomian global memiliki prospek yang kurang baik. Namun melihat dari pengalaman kota Cilegon dalam menghadapi krisis Covid 19 yang memiliki kinerja LPE yang diluar prediksi maka diharapkan dengan injeksi APBD pada tahun 2024 dan permintaan bahan setengah jadi yang tetap maka perekonomian Cilegon di proyeksikan akan tetap tumbuh.

Untuk Tingkat kemiskinan juga diturunkan dari target RPJMD yaitu sebesar 3,18% dengan asumsi yang sama menjadi 3,43% pada RKPD, asumsi dari penurunan target ini adalah masih belum pulihnya kondisi kemiskinan akibat pandemi. Target kemisknan ini masih jauh diatas target tingkat kemniskinan provinsi untuk Kota Cilegon yaitu sebesar 5,49 persen. Walaupun targetnya lebih rendah dari RPJMD, semangat upaya penurunan kemiskinan ekstrim yang di sertai dengan pemberdayaan ekonomi yang massif akan terus diogalakkan.

Sedangkan untuk TPT di asumsikan turun menjadi 8 persen yang di pengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dengan upaya perluasan kesempatan kerja baru dan melakukan perluasan pada sector riil dengan extra *effort* Secara lebih lengkap proyeksi indikator makro perekonomian daerah dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Proyeksi Indikator Makro Perekonomian Daerah

Indikator Makro Perekonomian	Target Tahun 2024
IPM	74.40
LPE	5.37
Tingkat Kemiskinan	3.43
TPT	8
Indeks Gini	0.32

Pada tahun 2020, LPE Kota Cilegon mencapai minus 1,23% sedangkan Provinsi Banten mencapai minus 3,38% dan nasional mencapai minus 2,19%, demikian juga dengan seluruh kabupaten/kota di provinsi banten, mencapai LPE yang minus. Jika dibandingkan degan Provinsi, Nasional, dan Kota-kota di Provinsi Banten, penurunan LPE Kota Cilegon tahun 2020 adalah terkecil atau mengalami pencapaian yang lebih baik.

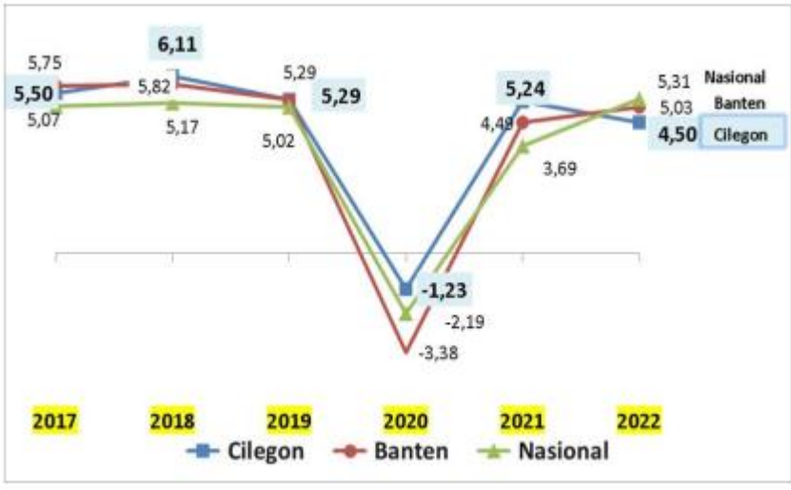

Gambar 2.3 Kontribusi Sektor PDRB ADHB Kota Cilegon Tahun 2022
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan data BPS Kota Cilegon, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada jenis pengeluaran konsumsi rumah tangga di tahun 2022 yaitu 15.357.348,69 (juta rupiah), maka pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di tahun 2022 adalah 34 (juta rupiah). Pada PDRB pendekatan

produksi, struktur PDRB Cilegon sebagai kota industri didominasi aktivitas produksi industri pengolahan. Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, rata-rata dominasi sektor industri pengolahan berada diatas 55 persen dari total PDRB Kota Cilegon di tahun 2022.

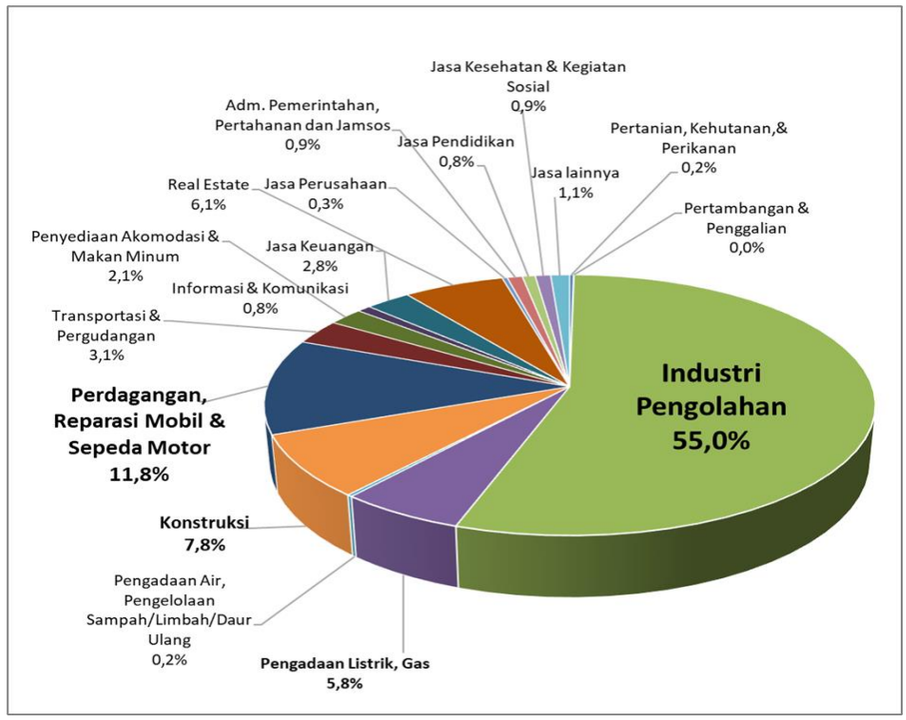

Gambar 2.4 Kontribusi Sektor PDRB ADHB Kota Cilegon Tahun 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Kondisi ketenagakerjaan di tahun 2023 juga diperkirakan membaik. Pertumbuhan ekonomi akan membuka peningkatan kesempatan kerja yang mendorong terhadap penurunan tingkat pengangguran.

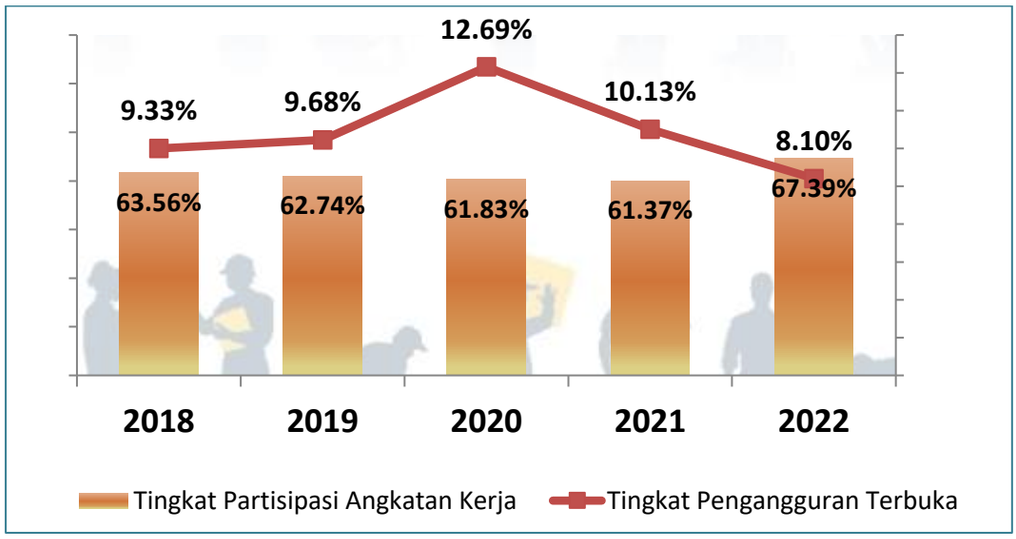

Gambar 2.5 Angka Pengangguran Terbuka Di Kota Cilegon Tahun 2018-2022
Sumber: Dokumen LKPJ Kota Cilegon Tahun 2022

Pada tahun 2022, Kota Cilegon mengalami penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebanyak 2,03% dari tahun 2021. Penurunan TPT Kota Cilegon tertinggi diantara Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yaitu pada tahun 2021 penurunannya sebesar 2,53% dan Tahun 2022 sebesar 2,03%.

Kinerja pembangunan sosial pada tahun 2023 juga diperkirakan membaik. Pulihnya perekonomian pasca pandemi covid-19 diserta dengan kegiatan sosial ekonomi yang berangsur normal, mendorong kegiatan sosial ekonomi dapat kembali dilakukan lebih efektif melalui tatap muka. Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia baik pada komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan maupun daya beli diperkirakan akan meningkat di tahun 2024.

Berdasarkan data BPS, Tingkat Kemiskinan Kota Cilegon pada tahun 2022 menurun menjadi 3,64% dari tahun sebelumnya 2021 yaitu 4,24%. Penurunan penduduk miskin sebesar 2.430 jiwa dari tahun 2021 sebesar 18.890 menjadi 16.460 di tahun 2022.

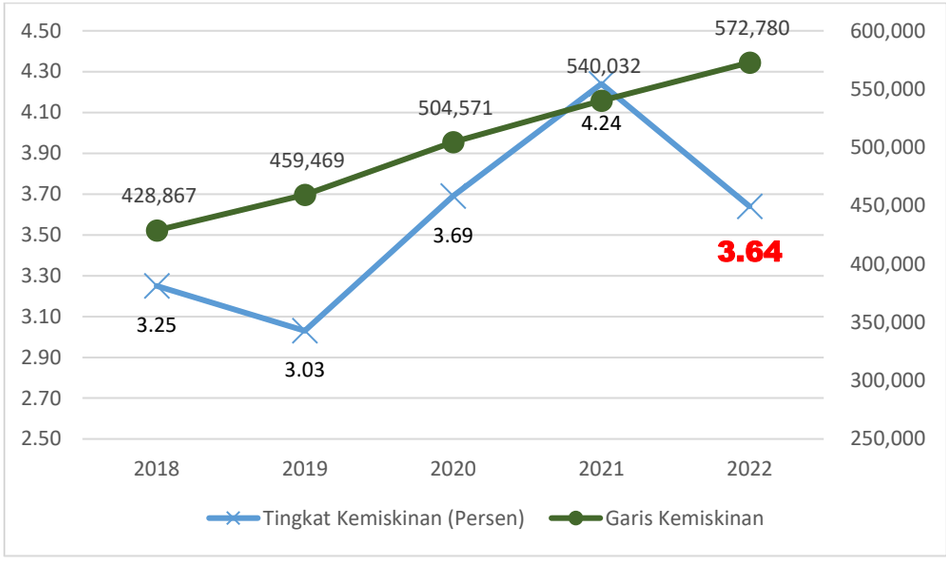

Gambar 2.6 Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kota Cilegon
Sumber : BPS Kota Cilegon

Pada 2022, persentase penduduk miskin di Banten mencapai 6,16 persen. Kota Cilegon sendiri menempati posisi kedua terbaik di Provinsi Banten dalam nilai persentase jumlah penduduk miskin setelah Kota Tangerang Selatan dan masih di bawah angka kemiskinan nasional dan angka kemiskinan Banten.

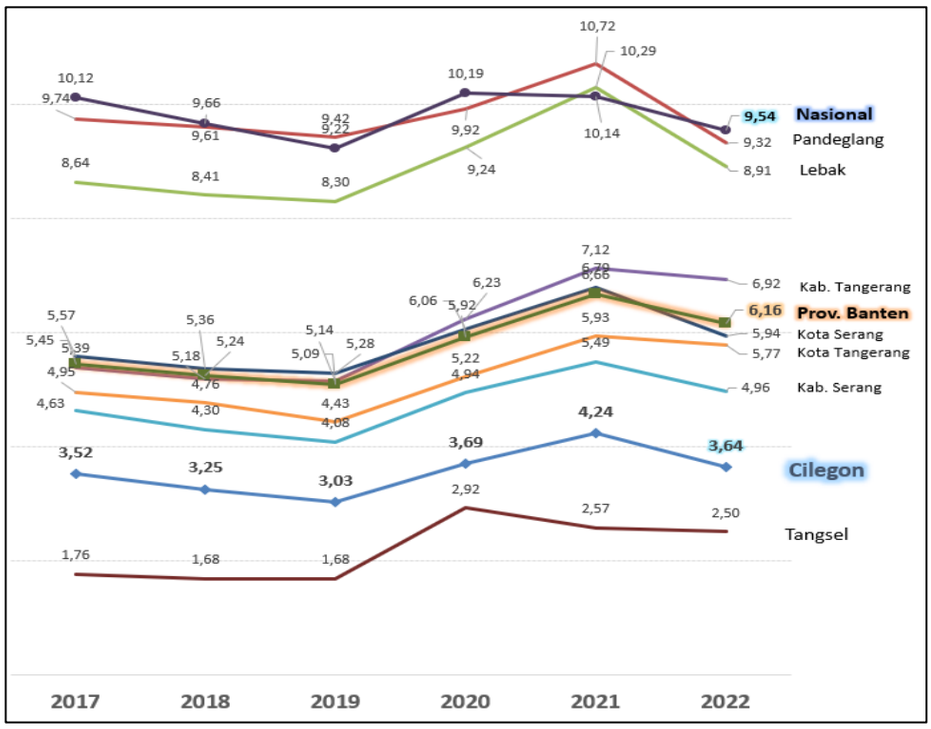

Gambar 2.7 Urutan Tingkat Kemiskinan Se Provinsi Banten Tahun 2022
Sumber : Dokumen LKPJ Kota Cilegon Tahun 2022

Tingkat kemiskinan Kota Cilegon dari tahun 2017-2022 selalu berada dibawah nilai tingkat kemiskinan Provinsi Banten, hal ini menunjukkan bahwa Kota Cilegon merupakan salah satu daerah yang memiliki kinerja yang baik dalam hal penanggulangan kemiskinan daerah. Kota Cilegon juga merupakan daerah yang berperan penting dalam menjaga nilai Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten tetap terjaga.

Terkait Indeks Pembangunan Manusia, Pembangunan manusia di Kota Cilegon secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2022, IPM Kota Cilegon telah mencapai 73,95 dibandingkan tahun lalu yang sebesar 73,35.

Kemajuan pembangunan manusia Kota Cilegon pada tahun 2022 mengalami percepatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM mencapai 0,82 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2021 yang hanya mencapai 0,41 persen. Status pembangunan manusia Kota Cilegon pada tahun 2022, berada pada level atau kategori “Tinggi” karena berada diantara angka 70 sampai 79.

Meningkatnya IPM Kota Cilegon terjadi pada semua komponen pembentuk. Dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen Rata-rata lama sekolah (RLS). Adapun nilai atau capaian Umur harapan Hidup (UHH) sebesar 67,02 tahun, Harapan lama Sekolah (HLS) sebesar 13,2 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 10,34 tahun dan Pengeluaran per Kapita disesuaikan sebesar 13,18 juta rupiah.

Tabel 2. 2 Perkembangan Komponen IPM Kota Cilegon Tahun 2018 – 2022

Indikator/ Variabel	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup Saat lahir (tahun)	66,43	66,60	66,67	66,69	67,02
Indeks angka harapan hidup (poin)	**71,43**	**71,69**	**71,73**	**71,83**	**72,34**
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,13	13,15	13,16	13,18	13,20
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,73	9,74	9,87	10,08	10,34
Indeks pendidikan (poin)	**68,91**	**68,99**	**71,31**	**70,21**	**71,13**
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	12.900	13.230	13.010	13.041	13.185
Indeks daya beli (poin)	**77,92**	**78,69**	**78,18**	**78,25**	**78,59**
IPM Cilegon	**72,65**	**73,01**	**73,05**	**73,35**	**73,95**

Sumber : BPS Kota Cilegon

Pada lingkup regional, pencapaian IPM Kota Cilegon menempati urutan ke-3 dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Banten.

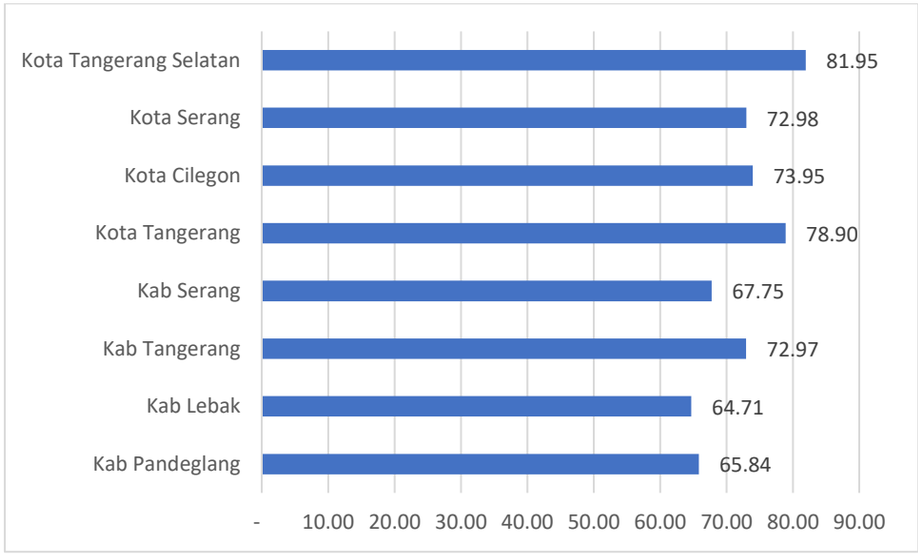

Gambar 2.8 IPM Kota Cilegon Di Provinsi Banten Tahun 2022
Sumber : Banten Dalam Angka 2023, diolah

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Sepanjang periode 2018 hingga 2022, Kota Cilegon telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir. selama 1,05 tahun atau rata-rata tumbuh 0,21 persen pertahun. Pertumbuhan UHH nya dalam setahun terakhir ini menvapai 0,49 persen, lebih cepat dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 0,03 persen. Adapun Umur Harapan Hidup Kota Cilegon pada tahun 2022 ini, mencapai 67,02 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Kota Cilegon yang lahir pada tahun 2022 dapat berharap untuk hidup sampai usia 67 tahun.

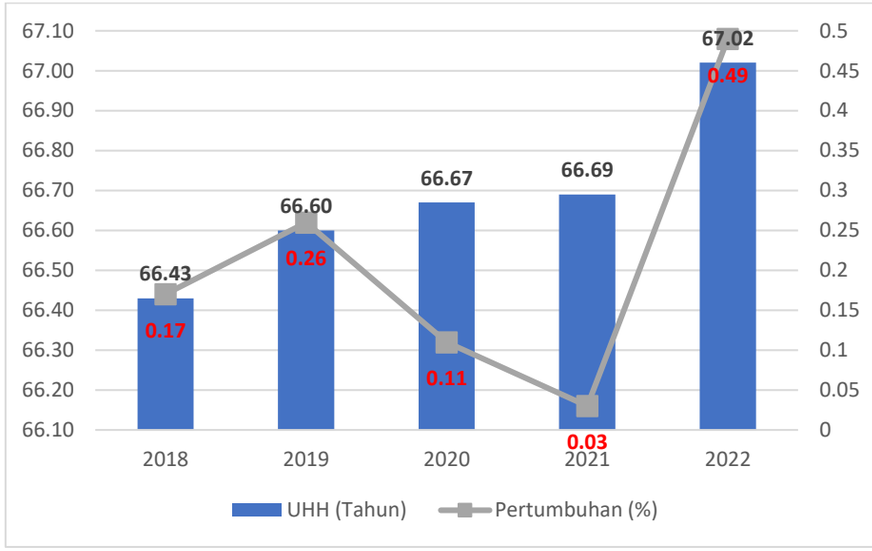

Gambar 2.9 Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Cilegon Tahun 2018- 2022

Sumber : BPS Kota Cilegon, diolah

Kondisi Umur Harapan Hidup Kota Cilegon saat ini berada dibawah angka UHH Provinsi Banten (70,39 tahun), jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten, Kota Cilegon menduduki peringkat ketujuh.

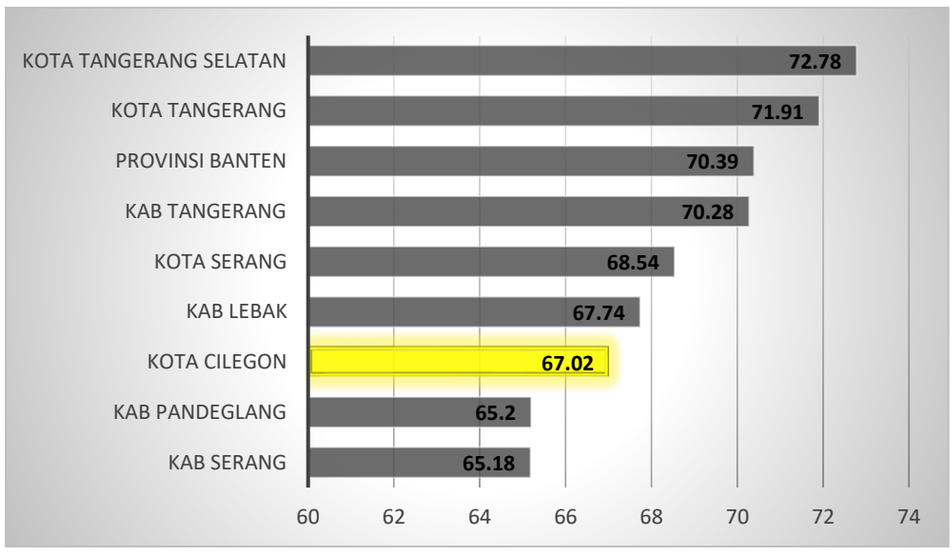

Gambar 2.10 Capaian Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2022

Sumber : BPS Provinsi Banten

Selama periode 2018 hingga 2022, Harapan Lama Sekolah telah meningkat. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah ini menjadi sinyal bahwa memang ada perbaikan pada sistem pendidikan di Kota Cilegon. Kondisi yang demikian sekaligus juga menjadi penanda dari semakin banyaknya penduduk yang dapat bersekolah. Selama setahun terakhir

peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah relatif lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 telah mencapai 13,20 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2022, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester III di perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

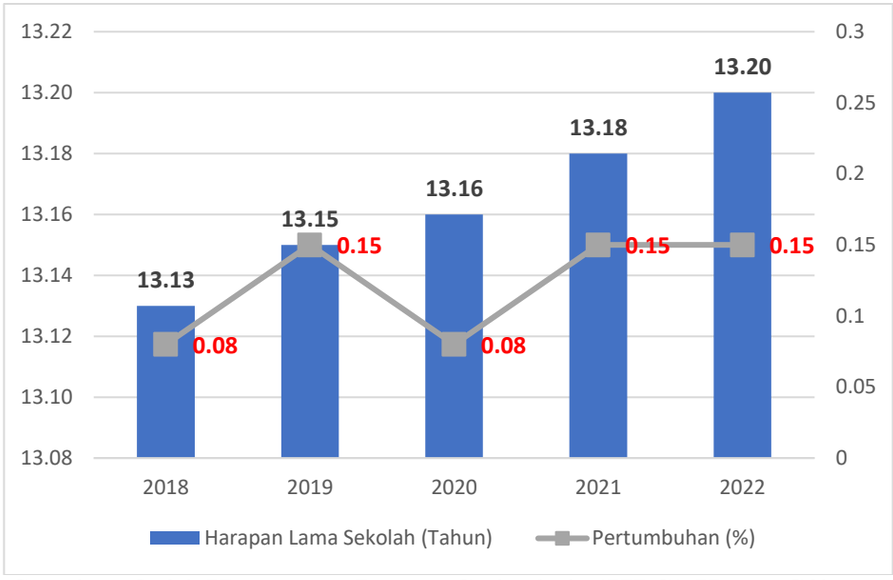

Gambar 2.11 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Cilegon Tahun 2018- 2022

Sumber : BPS Kota Cilegon, diolah

Kondisi Harapan Lama Sekolah saat ini sudah berada diatas angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Banten (13,05 tahun). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten, Kota Cilegon menduduki peringkat keempat.

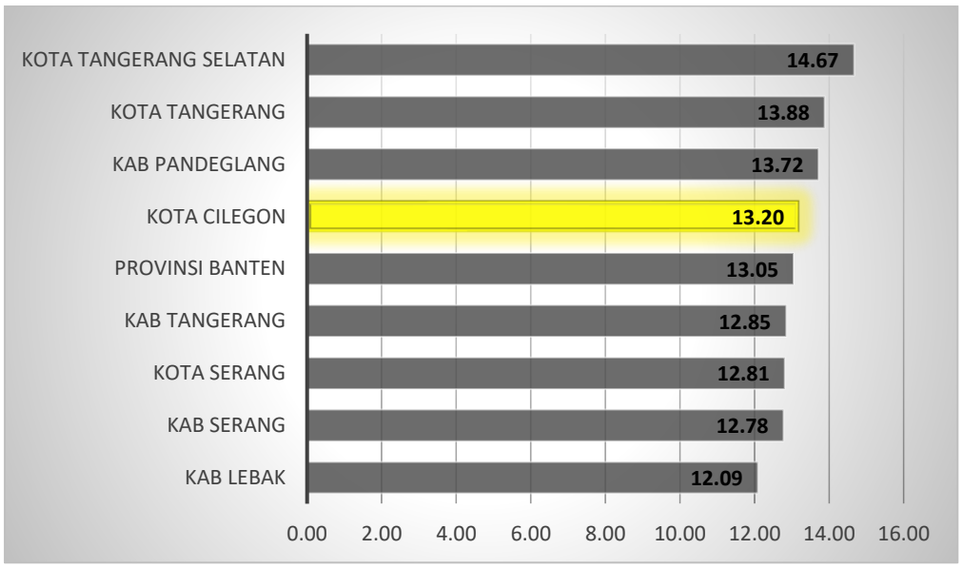

Gambar 2. 12 . Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2022
Sumber : BPS Provinsi Banten

Sementara itu Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cilegon pada tahun 2022 telah mencapai 10,34 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2022 telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I). Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Kota Cilegon terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

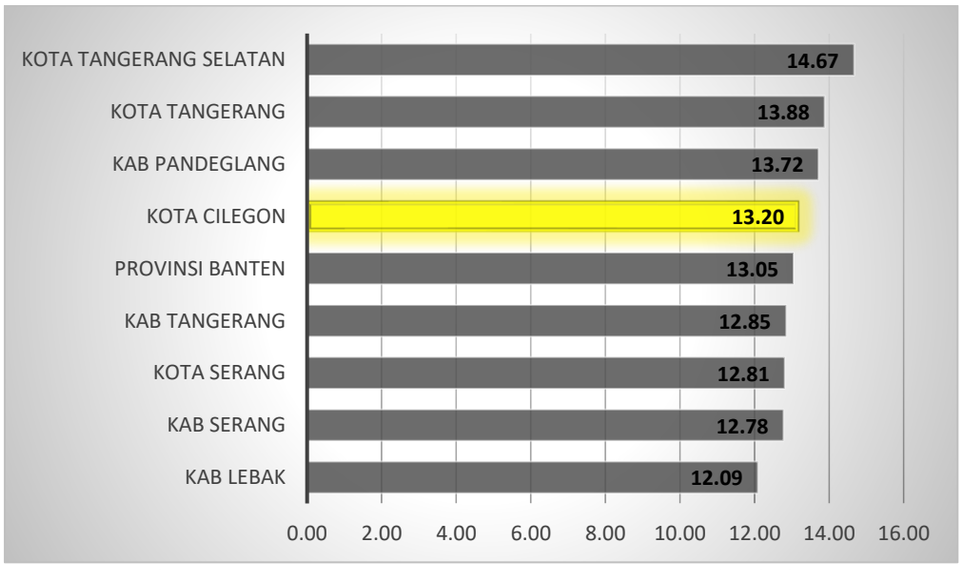

Gambar 2.13 Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Cilegon Tahun 2018- 2022
Sumber : BPS Kota Cilegon, diolah

Kondisi Rata-rata Lama Sekolah saat ini sudah berada diatas angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Banten (9,13 tahun). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten, Kota Cilegon menduduki peringkat ketiga.

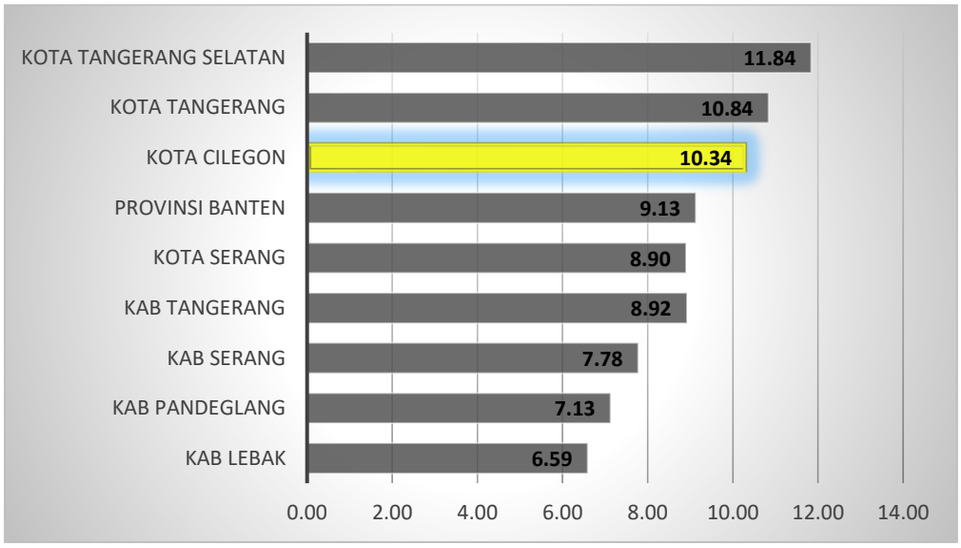

Gambar 2.14 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2022
Sumber : BPS Provinsi Banten

Pada komponen daya beli atau purchasing power parity yang dalam hal ini diukur dari pengeluaran perkapita masyarakat terhadap 96 jenis komoditas, menunjukan sedikit peningkatan dari 2021 ke 2022. Dibandingkan dengan Provinsi Banten, daya beli Kota Cilegon yang sebesar 13,18 juta per kapita/tahun berada di atas Provinsi Banten yang mencapai Rp 12,21 juta/kapita/tahun. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan ekonomi penduduk Cilegon lebih baik dari rata-rata provinsi dan nasional. Jika dikaitkan dari sisi ketimpangan ekonomi, indeks gini rasio Kota Cilegon di tahun 2022 mencapai 0,318, membaik jika dibandingkan dengan angka rasio gini pada tahun sebelumnya (2021 = 0,363).

Dibandingkan dengan Provinsi Banten, daya beli Kota Cilegon pada tahun 2021 sebesar 13,04 juta per kapita/tahun berada di atas Provinsi Banten yang mencapai 'hanya' Rp 12,03 juta/kapita/tahun dan cukup jauh di atas rata-rata pengeluaran penduduk Indonesia yang 'baru mencapai' Rp 11,15 juta/kapita/tahun. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan ekonomi penduduk Cilegon lebih baik dari rata-rata provinsi dan nasional.

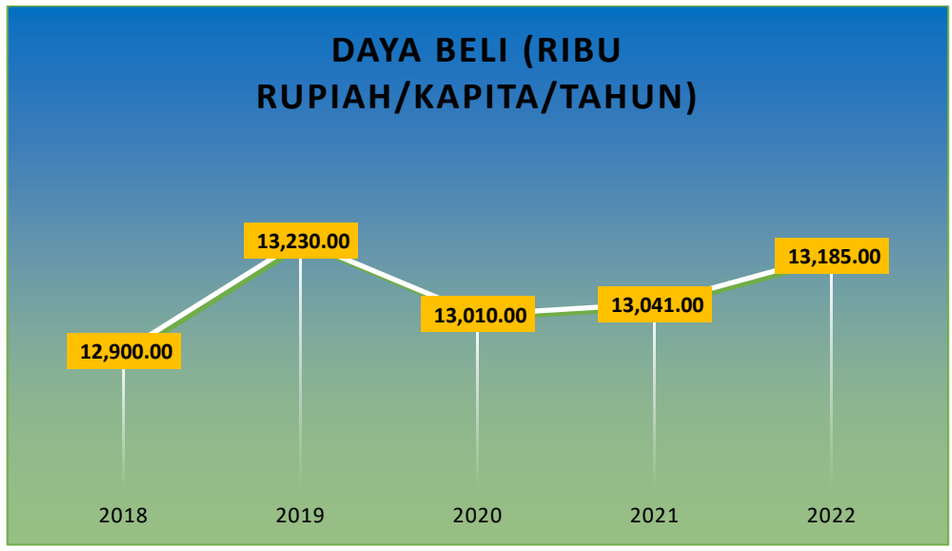

Gambar 2.15 Perkembangan Daya Beli Masyarakat Cilegon Tahun 2018-2022

Sumber : BPS Kota Cilegon, diolah

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten, Kota Cilegon menduduki peringkat keempat.

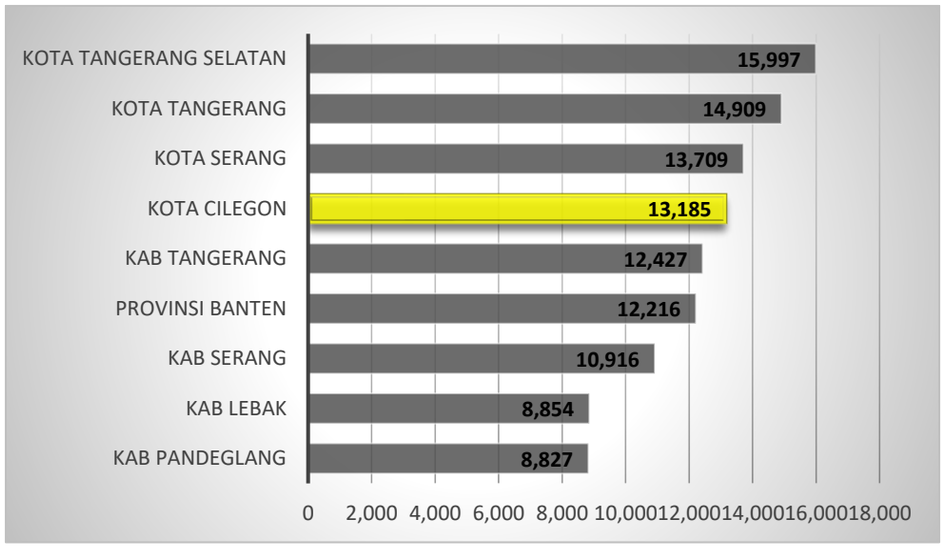

Gambar 2.16 Capaian Daya Beli Masyarakat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2022 (Ribu Rupiah/Tahun)

Sumber : BPS Kota Cilegon, diolah

Jika dikaitkan dari sisi ketimpangan ekonomi, indeks gini Kota Cilegon menurun hingga mencapai 0,318, angka rasio gini membaik jika dibandingkan pada tahun sebelumnya (2021 = 0,363). Penurunan gini ratio Kota Cilegon adalah yang tertinggi di provinsi Banten, sehingga hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan atau gap/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Cilegon sudah menurun cukup signifikan.

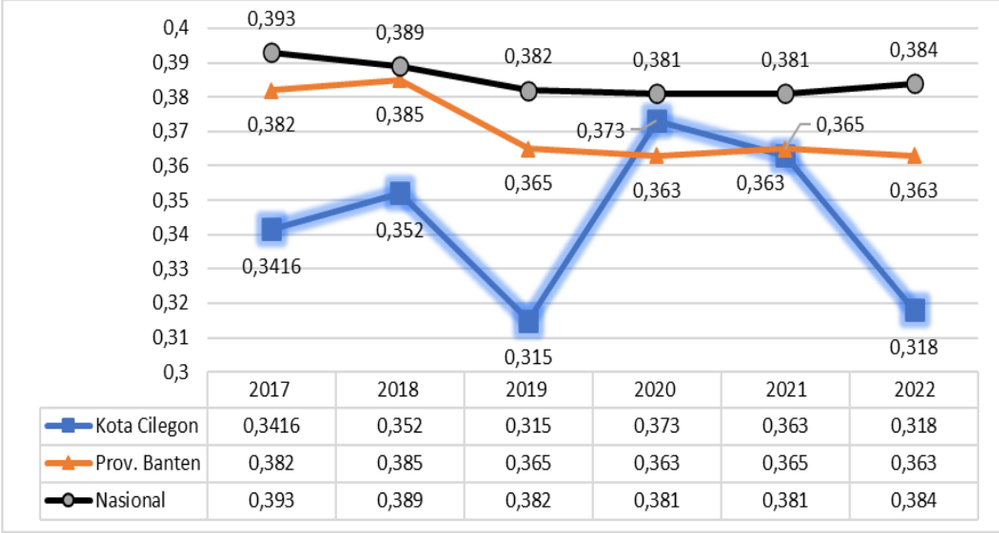

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Cilegon	0,3416	0,352	0,315	0,373	0,363	0,318
Prov. Banten	0,382	0,385	0,365	0,363	0,365	0,363
Nasional	0,393	0,389	0,382	0,381	0,381	0,384

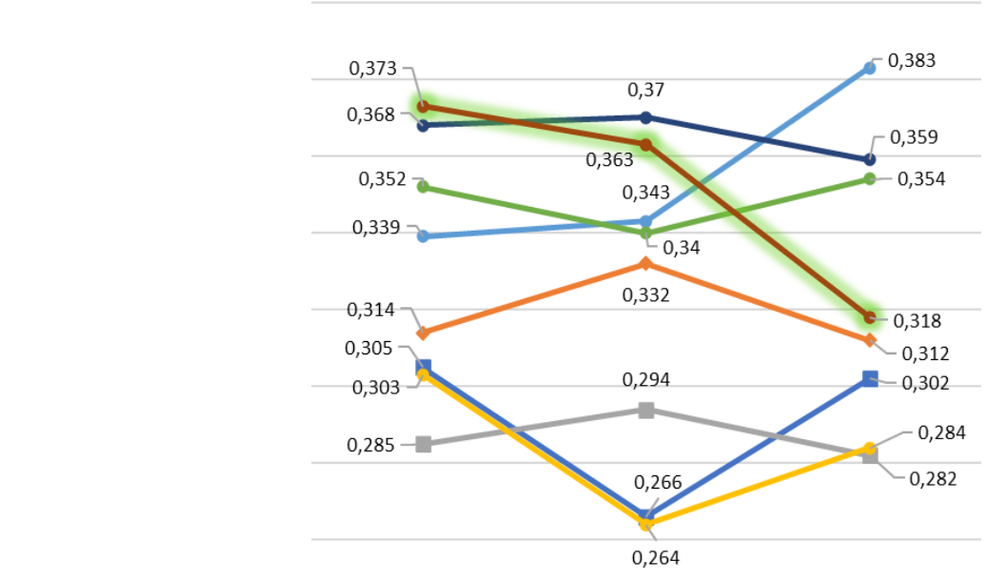

	2020	2021	2022
Pandeglang	0,305	0,266	0,302
Lebak	0,314	0,332	0,312
Tangerang	0,285	0,294	0,282
Serang	0,303	0,264	0,284
Kota Tangerang	0,339	0,343	0,383
Kota Serang	0,352	0,34	0,354
Kota Tangerang Selatan	0,368	0,37	0,359
Kota Cilegon	0,373	0,363	0,318

Gambar 2. 17 Indeks Gini Ratio
Sumber : Dokumen LKPJ Kota Cilegon Tahun 2022

Kinerja investasi yang terus meningkat memberikan sinyal positif kondisi perekonomian yang lebih baik pada tahun 2024.

Sepanjang tahun 2022, nilai investasi yang tercatat di Kota

Cilegon adalah sebesar Rp. 32.954.686.479.480 (32 trilyun rupiah), dengan total laju pertumbuhan sebesar 14,36%, meliputi realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 32.032.388.979.480 (32 trilyun) dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 922.297.500.000 (922 juta). Realisasi investasi di Kota Cilegon dalam lima tahun terakhir selalu didominasi oleh penanaman modal oleh perusahaan asing (PMA), terutama dari perusahaan yang bergerak pada sektor sektor industri kimia.

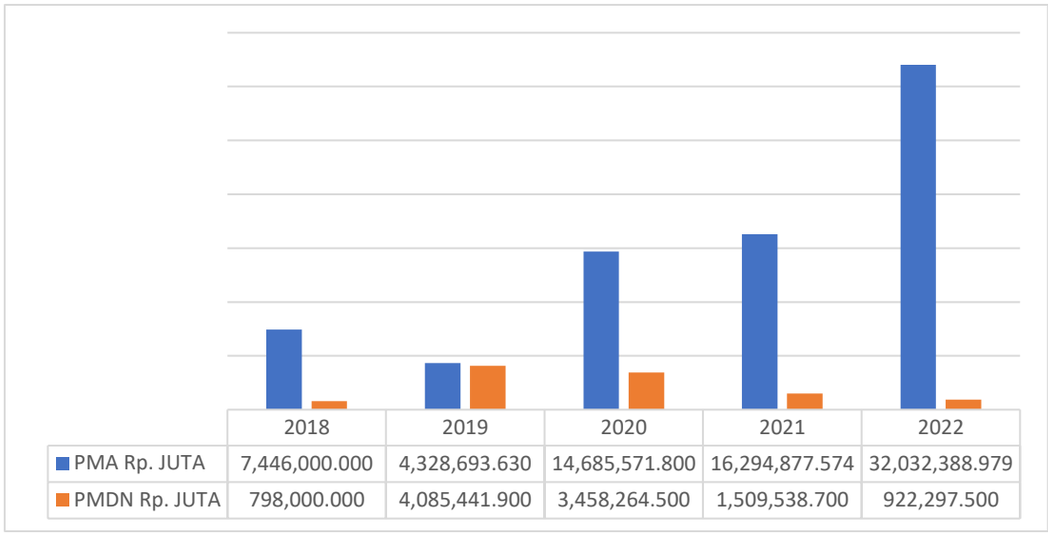

	2018	2019	2020	2021	2022
PMA Rp. JUTA	7,446,000.000	4,328,693.630	14,685,571.800	16,294,877.574	32,032,388.979
PMDN Rp. JUTA	798,000.000	4,085,441.900	3,458,264.500	1,509,538.700	922,297.500

Gambar 2.18 Jumlah Penambahan Investasi PMA & PMDN tahun 2022 (dalam jutaan rupiah)
Sumber : DPMPTSP Kota Cilegon, 2022

Ditahun 2022 Realisasi investasi di Kota Cilegon menunjukan hasil yang sangat baik dengan laju total investasi sebesar 14,36%. Realisasi investasi sepanjang tahun 2022 di Kota Cilegon merupakan yang terbesar se-provinsi Banten.

Gambar 2.19 Perbandingan Realisasi Investasi tahun 2022 di Provinsi Banten
Sumber : DMPTSP

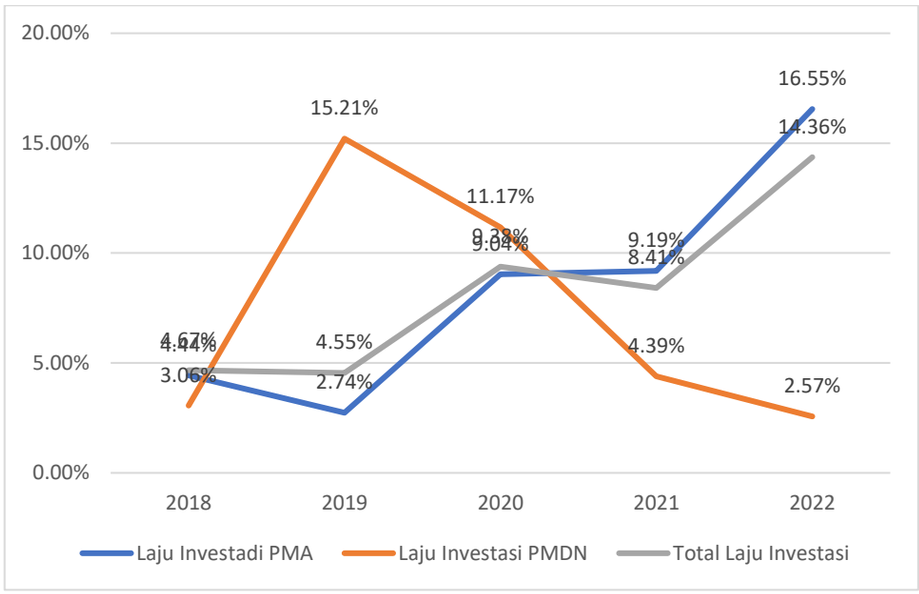

Gambar 2.20 Laju Peningkatan Investasi Kota Cilegon 2017-2022
Sumber : DPMPTSP Kota Cilegon, diolah

Daya beli masyarakat yang diperkirakan meningkat di tahun 2024 akan mendorong terhadap penurunan inflasi di tahun 2024, dengan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Tentunya hal ini harus diiringi dengan adanya kebijakanan Pemerintah untuk menjaga stabilitas barang dan jasa.

Di tahun 2022, inflasi melonjak cukup tinggi, yang beberapa penyebabnya antara lain peningkatan harga minyak goreng di April 2022 lalu serta adanya dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September

2022 lalu secara nasional. Laju inflasi Kota Cilegon pada 2022 mencapai 5,86%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni 2,19 (2021), 2,62% (2020), 3,54% (2019), dan 2,73% (2018).

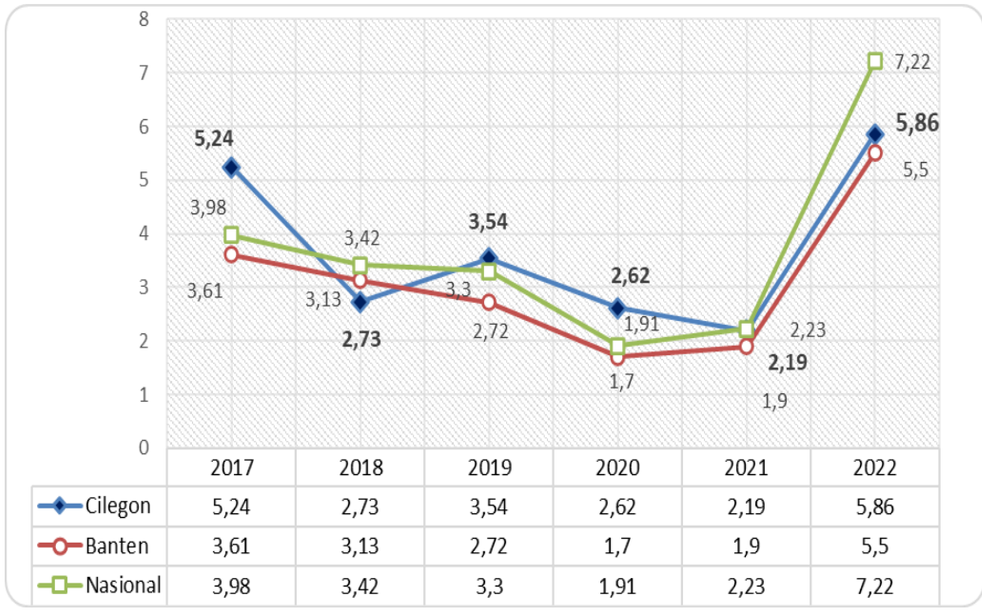

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cilegon	5,24	2,73	3,54	2,62	2,19	5,86
Banten	3,61	3,13	2,72	1,7	1,9	5,5
Nasional	3,98	3,42	3,3	1,91	2,23	7,22

Gambar 2. 21 Perbandingan Inflasi Kota Cilegon dengan Nasional dan Provinsi Banten
Sumber: Dokumen LKPJ Kota Cilegon Tahun 2022

Di sepanjang 2022, 5 kelompok pengeluaran terbesar yang mengalami inflasi adalah pada kelompok transportasi sebesar 16,57%, pendidikan (7,19%), makanan (5,95%), Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (5,92%), serta penyediaan makanan dan minuman/restoran.

Adapun satu – satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan (-0,16%) di sepanjang tahun 2022.

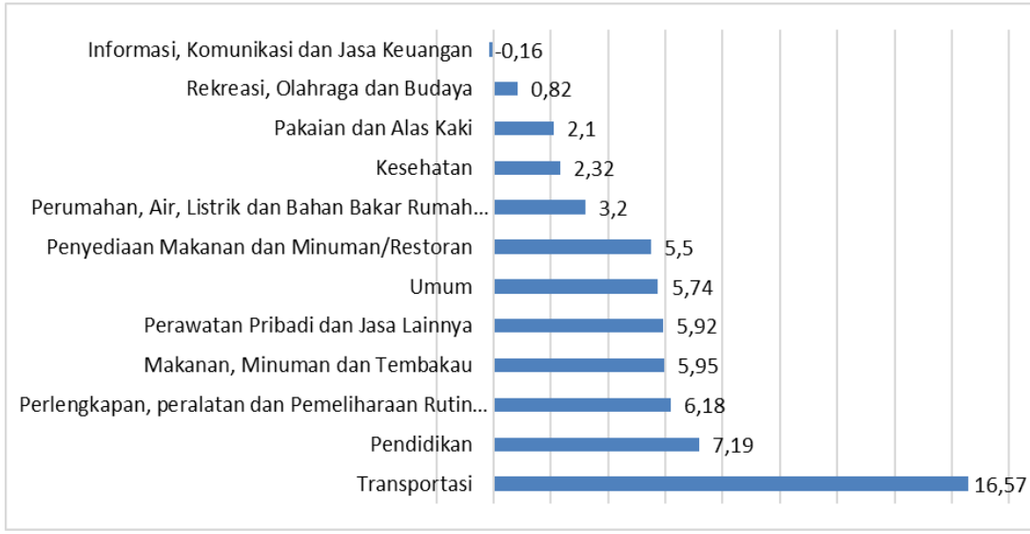

Gambar 2.22 Inflasi Kota Cilegon berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2022 (YoY)
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan mempunyai fungsi untuk mendorong dan memfasilitasi pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat lokal sehingga arah pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta dapat menyusun kebijakan keuangan yang tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah bermanfaat dalam pengelolaan dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Arah kebijakan keuangan yang tepat akan menghasilkan kondisi keuangan daerah yang semakin meningkat dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan.

Kebijakan keuangan daerah lebih menekankan pada upaya pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah daerah, termasuk juga pembiayaan daerah. Kebijakan ini lebih terkait dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan keuangan daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2024 adalah meningkatkan kualitas anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada regulasi tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota.

Pada aspek pendapatan, kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan tetap menjaga perekonomian.

Pada aspek belanja, kebijakan belanja daerah adalah peningkatkan kualitas belanja daerah agar efisien, produktif dan akutabel.

Pada aspek pembiayaan, kebijakan pembiayaan dibagi atas dua bagian yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan Penerimaan pembiayaan daerah secara umum diarahkan pada penyediaan dana dalam rangka menutup defisit anggaran yang bersumber dari sisa lebih perhitungan APBD. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk investasi dalam rangka penyertaan modal yang pengalokasiannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan mempedomani peraturan daerah tentang penyertaan modal serta pembentukan dana cadangan.

BAB III
ASUMSI DASAR PENYUSUNAN R-APBD 2024

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN RAPBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Merujuk kepada Rancangan RKP tahun 2024, tema RKP di tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan prioritas nasional meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2024 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Berakhirnya pandemi Covid-19 bukan berarti tantangan yang akan dihadapi menjadi semakin ringan. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemic Covid-19, menciptakan kompleksitas yang berat dalam

beberapa tahun kedepan. Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan

Pertama, ketegangan geopolitik, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan.

Kedua, cepatnya perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Namun, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia (*labor saving*) secara masif, persoalan privasi, dan kemananan siber (*cyber security*).

Ketiga, perubahan iklim serta respon kebijakan yang mengikutinya. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Cuaca ekstrem hingga bencana alam yang sering terjadi, terkait erat dengan perubahan iklim. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara-negara maju terhadap perubahan iklim juga akan menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Penerapan kebijakan inflation Reduction Act (IRA) di AS dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa berpontensi menjadi hambatan nontarif bagi arus perdagangan internasional dan investasi dari dan ke AS, termasuk semakin ketatnya ketersediaan pendanaan investai bagi negara berembang.

Keempat, Covid-19 telah menjadi bukti bahwa munculnya sebuah pandemic tidak bisa terelakkan. Meskipun pandemic Covid-19 telah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu dibangun mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar. Selain itu, kita masih berjuang mengatasi dampak jangka panjang Covid-19, dalam bentuk scarring effect dampak scarring effect memicu supply disruption yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi.

Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi

momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan. Adapun asumsi ekonomi makro Nasional sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDB mencapai 5,40 – 5,65%;
2. Rata-rata inflasi sebesar 1.5-3.5%;
3. Rata-rata nilai tukar sebesar Rp. 14.700-15.300 per dolar AS;
4. Suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun sebesar 6,49-6,91%;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,6%;
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,58%
7. Rasio Gini sebesar 0,354 point
8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,27 point

3.2 ASUMSI DASAR RAPBD PROVINSI

Perekonomian provinsi banten dihasilkan dari aktivitas ekonomi diwilayah utara (Kabupaten serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota serang dan Kota Tangerang selatan) yang tertumpu pada sektor sekunder dan tersier, sedangkan kurang lebih 12,0 persen sisanya dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di wilayah selatan (Kabupaten pandeglang dan lebak) yang bertumpu pada sektor primer.

Ketidakmerataan kondisi perekonomian wilayah, dapat diklasifikasikan dalam daerah sangat berkembang (Kabupaten Tangerang (termasuk kota tangsel), dan Kota Tangerang), daerah berkembang (kabupaten serang, dan Kota cilegon), serta daerah sedang berkembang (Kota serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang).

Ada 4 (empat) kunci sukses untuk memanfaatkan momentum dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, yaitu :

1. Untuk mendorong konsumen agar tetap kuat dengan menjaga tingkat inflasi yang stabil, rendah, serta mempertahankan penyaluran bansos yang tepat sasaran;

2. Mendorong akselerasi proyek infrastruktur dan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor produktif;
3. Mempercepat pembenahan regulasi perizinan dengan optimalisasi OSS dan peningkatan daya saing dalam upaya menarik investasi ke Provinsi Banten;
4. Bersama pemerintah pusat untuk meningkatkan daya saing industri unggulan yang tercakup dalam Roadmap Indonesia 4.0.

Namun pertumbuhan Ekonomi Banten menghadapi tekanan luar negeri yang cukup berat. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi global pada periode tersebut telah mengalami perlambatan. Demikian pula dengan negara-negara mitra dagang utama Banten, yang juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Imbasnya, setelah pada tahun sebelumnya mengalami akselerasi, pada tahun 2024 ini pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten diasumsikan sebagai berikut :

1. IPM sebesar 73,27 Poin
2. LPE sebesar 5,4%
3. Penduduk Miskin sebesar 5,58%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,6%
5. Gini Ratio sebesar 0,354 Point

Merujuk kepada RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 adalah **"Pemantapan Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Kerangka Tahap Modernisai"** dengan prioritas meliputi :

1. Meningkatkan daya saing SDM yang kompetitif;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
3. Meningkatkan Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi; dan
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU.

3.3 ASUMSI DASAR RAPBD KOTA CILEGON

Berdasarkan analisa terhadap issue strategis dan permasalahan permasalahan pembangunan daerah, tema RKPD Kota Cilegon di tahun 2024 adalah

"**MEMANTAPKAN KUALITAS SDM DAN DAYA SAING**

EKONOMI MENUJU CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT"

Kualitas Sumber Daya Manusia adalah sumber daya yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual dan kualitas mental spiritual.

Daya Saing Ekonomi menyatakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Cilegon Baru berarti bahwa Pemerintah Kota Cilegon harus menjadi motor bagi masyarakatnya untuk melakukan perbaikan, pembaruan dan peningkatan kualitas.

Cilegon Modern berarti bahwa Kota Cilegon diproyeksikan untuk menjadi kota yang adaptif dengan teknologi, memiliki kelengkapan fasilitas umum, tingkat kesejahteraan yang baik dan kepuasan warga yang tinggi.

Cilegon Bermartabat berarti bahwa Masyarakat dan Pemerintah Kota Cilegon mampu menerapkan nilai-nilai luhur agama, budaya dan peradaban dalam seluruh aspek pembangunan. Sehingga, menempatkan Kota Cilegon sejajar atau lebih baik dibandingkan kota lainnya.

Berpijak pada kondisi dan tantangan pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka prioritas dan agenda pembangunan Kota Cilegon tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Layanan Pemerintahan
   a. Peningkatan akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur
   b. Optimalisasi penyelenggaraan SPBE
   c. Penerapan Sistem Merit dalam pengelolaan kinerja pegawai
   d. Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan
   e. Peningkatan pengelolaan Satu Data Indonesia
   f. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu
   g. Peningkatan inovasi daerah
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan
   a. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan
   b. Peningkatan budaya literasi masyarakat

3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
   a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
4. Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat (berperadaban)
   a. Peningkatan perlindungan dan kualitas hidup perempuan dan anak
   b. Pembinaan dan pemberdayaan pemuda
   c. Pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga
   d. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan serta pelayanan transportasi
   e. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana permukiman
   f. Penyediaan sarpras perkotaan dan penataan kota
   g. Optimalisasi penanganan banjir
   h. Peningkatan pelayanan air bersih dan pengelolaan limbah domestik
   i. Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi dan penanggulangan bencana
   j. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan
   k. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan produksi pertanian lokal
   l. Peningkatan pengendalian dan monitoring pemanfaatan ruang
   m. Peningkatan kondusivitas wilayah
   n. Pengembangan pariwisata
5. Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
   a. Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial
   b. Peningkatan kemitraan UMK dengan koperasi dan industry besar/menengah
   c. Peningkatan kesempatan kerja
   d. Peningkatan Daya Tarik Investasi dan penanaman moda
   e. Penguatan pengendalian dan stabilitas harga komoditas
   f. Peningkatan pertumbuhan perdagangan
   g. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2024 bila disandingkan dengan tema RKP dan RKPD

Provinsi Banten adalah sebagai berikut.

TEMA RKP PUSAT	TEMA RKPD PROVINSI BANTEN	TEMA RKPD KOTA CILEGON
Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	***Pemantapan Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Kerangka Tahap Modernisasi***	***Memantapkan Kualitas Sdm Dan Daya Saing Ekonomi Menuju Cilegon Baru, Modern Dan Bermartabat***

Tema yang terdapat pada RKP Pusat, RKPD Provinsi Banten dan RKPD Kota Cilegon memiliki sinkronisasi satu sama lain, Tahun 2024 menjadi tahun dimana pemulihan ekonomi menjadi prioritas yang muncul pada tema dengan mengedepankan perubahan yang adaptif terhadap kondisi pasca pandemi.

Sinkronisasi prioritas RKP Pusat, Prioritas RKPD Provinsi Banten dengan RKPD Kota Cilegon Tahun 2024 diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Sinkronisasi Prioritas RKP Pusat, RKPD Provinsi Banten dan RKPD Kota Cilegon Tahun 2024

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI BANTEN	PRIORITAS KOTA CILEGON
1.	**PN-1** Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	**Prioritas 1** Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	**Prioritas 5** Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
2.	**PN-2** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	**Prioritas 1** Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	**Prioritas 5** Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
3	**PN-3** Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	**Prioritas 2** Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatn kualitas sumberdaya manusia	**Prioritas 2** Peningkatan Kualitas Pendidikan **Prioritas 3** Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
4	**PN-4**	**Prioritas 2** Meningkatkan kesejahteraan	**Prioritas 2** Peningkatan Kualitas Pendidikan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI BANTEN	PRIORITAS KOTA CILEGON
	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	**Prioritas 4** Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat (berperadaban)
5	**PN-5** Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	**Prioritas 1** Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	**Prioritas 5** Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
6	**PN-6** Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	**Prioritas 3** Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	**Prioritas 4** Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat (berperadaban)
7	**PN-7** Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik	**Prioritas 4** Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	**Prioritas 1** Peningkatan Layanan Pemerintahan

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian indikator makro hingga tahun 2022 serta perkiraan kondisi perekonomian di tahun 2023 dan 2024, proyeksi ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dalam penyusunan APBD Kota Cilegon tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Proyeksi Ekonomi Makro Kota Cilegon Tahun 2024

Indikator	Satuan	Proyeksi Ekonomi Makro Tahun 2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,27
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,4
Kemiskinan	%	5,58
Tingkat Pengangguran	%	7,6
Indeks Gini	Poin	0,354

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon mengacu pada Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan peningkatan pendapatan daerah di tahun 2024 ditujukan pada penguatan pajak daerah dengan tetap menjaga perekonomian.

Pendapatan daerah yang dianggarkan pada APBD tahun 2024 disusun secara terukur dan rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peranturan perundang-undangan.

Berpedoman kepada regulasi tentang harmonisasi keuangan Pusat dan Daerah, kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan melalui :

1. Restrukturisasi jenis pajak daerah dengan tetap menjaga penerimaan PAD, khususnya yang berbasis konsumsi menjadi pajak barang dan jasa tertentu; Sebagaimana diatur pada UU No 1 Tahun 2022, hal ini bertujuan untuk :
   a. Menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
   b. Menyederhaakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan pajak;
   c. Memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Daerah;
   d. Mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan
2. Penyederhanaan retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan, yang mana hal ini bertujuan agar retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah retribusi yang dapat

dipungut secara efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Rasionalisasi ini juga dalam upaya mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

3. Perluasan basis pajak melalui penggunaan opsen pajak sebagai penggantian skema bagi hasil tanpa menambah beban wajib pajak.
4. Peninjauan kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi Daerah.
5. Peningkatan kinerja daerah untuk mendorong peningkatan alokasi dana transfer keuangan daerah baik terkait dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus maupun dana insentif daerah.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Target pendapatan daerah tahun 2024 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Kota Cilegon Tahun 2024

KODE	URAIAN	RINGKASAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		PENYAMPAIAN RPPAS 2024	FINALISASI HASIL PEMBAHASAN BERSAMA PPAS 2024	
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1,125,083,592,443.00**	**1,175,583,592,443.00**	**50,500,000,000.00**
4.1.01	Pajak Daerah	949,892,543,820.00	1,000,392,543,820.00	50,500,000,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	22,831,014,257.00	22,831,014,257.00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19,578,060,861.00	19,578,060,861.00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	132,781,973,505.00	132,781,973,505.00	-
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,031,324,411,270.00**	**1,031,324,411,270.00**	**-**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	871,545,911,270.00	871,545,911,270.00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	159,778,500,000.00	159,778,500,000.00	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-		-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			-
	Jumlah Pendapatan	**2,156,408,003,713.00**	**2,206,908,003,713.00**	**50,500,000,000.00**

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Kebijakan belanja daerah merupakan kebijakan yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang- undangan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas belanja daerah yang efisien, produktif dan akuntabel, kebijakan belanja dilakukan melalui :

1. Meningkatkan kualitas penganggaran belanja daerah melalui pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja;
2. Meningkatkan sinkronisasi program melalui pengalokasian belanja daerah untuk prioritas pembangunan, pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, serta berdasarkan target kinerja dan skala prioritas;
3. Meningkatkan standardisasi belanja daerah melalui penerapan standar unit cost belanja dan analisis standar belanja.
4. Optimalisasi penggunaan asset pemerintah kota Cilegon dalam pemenuhan kebutuhan internal daerah.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga pada tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 5. 1 Rencana Belanja Daerah Kota Cilegon
Tahun 2024

KODE	URAIAN	RINGKASAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		PENYAMPAIAN RPPAS 2024	FINALISASI HASIL PEMBAHASAN BERSAMA PPAS 2024	
5	BELANJA			-
5.1	BELANJA OPERASI	1,945,234,798,088.00	1,966,666,367,119.00	21,431,569,031.00
5.2	BELANJA MODAL	311,028,381,409.00	340,096,812,378.00	29,068,430,969.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
	Jumlah Belanja	2,266,263,179,497.00	2,316,763,179,497.00	50,500,000,000.00

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah merupakan kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Selain itu, arah kebijakan ini juga mengatur transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran daerah yang disebabkan oleh lebih kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan belanja daerah yang harus dipenuhi akibat kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dilaksanakan melalui :

1. Penganggaran SILPA berdasarkan pertimbangan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 dan dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran tahun anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan, yang bersumber dari :
   1) pelampauan penerimaan PAD;
   2) pelampauan penerimaan pendapatan transfer
   3) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
   4) pelampauan penerimaan pembiayaan;
   5) penghematan belanja;
   6) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
   7) sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan
2. Pencairan dana cadangan sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dilaksanakan melalui :

1. Investasi daerah dalam bentuk penyertaan modal atau investasi lainnya yang pengalokasiannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan mempedomani peraturan perundangan
2. Pembentuakn dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2024.

Tabel 6. 1 Rencana Pembiayaan Daerah Kota Cilegon Tahun 2024

KODE	URAIAN	RINGKASAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		PENYAMPAIAN RPPAS 2024	FINALISASI HASIL PEMBAHASAN BERSAMA PPAS 2024	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**119,855,175,784.00**	**119,855,175,784.00**	**-**
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	119,855,175,784.00	119,855,175,784.00	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**-**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**109,855,175,784.00**	**109,855,175,784.00**	**-**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-
TOTAL APBD		**2,276,263,179,497.00**	**2,326,763,179,497.00**	**50,500,000,000.00**

Adapun ringkasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 6.2 Ringkasan RAPBD Kota Cilegon Tahun 2024

KODE	URAIAN	RINGKASAN		BERTAMBAH / BERKURANG
		PENYAMPAIAN RPPAS 2024	FINALISASI HASIL PEMBAHASAN BERSAMA PPAS 2024	
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1,125,083,592,443.00**	**1,175,583,592,443.00**	**50,500,000,000.00**
4.1.01	Pajak Daerah	949,892,543,820.00	1,000,392,543,820.00	50,500,000,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	22,831,014,257.00	22,831,014,257.00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19,578,060,861.00	19,578,060,861.00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	132,781,973,505.00	132,781,973,505.00	-
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,031,324,411,270.00**	**1,031,324,411,270.00**	**-**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	871,545,911,270.00	871,545,911,270.00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	159,778,500,000.00	159,778,500,000.00	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-		-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			-
	Jumlah Pendapatan	**2,156,408,003,713.00**	**2,206,908,003,713.00**	**50,500,000,000.00**
5	**BELANJA**			-
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1,945,234,798,088.00**	**1,966,666,367,119.00**	**21,431,569,031.00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**311,028,381,409.00**	**340,096,812,378.00**	**29,068,430,969.00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**-**
	Jumlah Belanja	**2,266,263,179,497.00**	**2,316,763,179,497.00**	**50,500,000,000.00**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**119,855,175,784.00**	**119,855,175,784.00**	**-**
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	119,855,175,784.00	119,855,175,784.00	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**-**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**109,855,175,784.00**	**109,855,175,784.00**	**-**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-
TOTAL APBD		**2,276,263,179,497.00**	**2,326,763,179,497.00**	**50,500,000,000.00**

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Pencapaian rencana pendapatan dan belanja tahun 2024 tersebut dilakukan melalui beberapa strategi yang merupakan penjabaran dari 5 misi pembangunan daerah, sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Rumusan Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan pada tahun 2024 pada masing-masing misi pembangunan sebagaimana dicantumkan pada tabel berikut :

7.1 STRATEGI PADA MISI 1 MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL

Pencapaian strategi pada misi Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

Tabel 7.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1 Menghadirkan Pemerintahan Daerah Yang Profesional Dan Akuntabel

VISI & MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4
VISI : Mewujudkan Cilegon Baru Modern dan Bermartabat			
M1 Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			
	T1.1 Meningkatnya layanan pemerintahan	T1.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	78,00 (A) Poin
	S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	S1.1.1.1 Nilai SAKIP	78,99 (BB) Poin
	S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	S1.1.1.2 Indeks Merit Sistem	305 Poin (100-400)

VISI & MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4
	S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	S1.1.1.3 Indeks Manajemen Resiko	2 Level (1-4)
	S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	S1.1.1.4 Indeks Profesionalitas ASN	72 Poin (0-100)

7.2 STRATEGI PADA MISI 2 MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

Pencapaian sasaran pada misi Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

Tabel 7.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

VISI & MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4
VISI : Mewujudkan Cilegon Baru Modern dan Bermartabat			
M2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas			
	T2.1 Peningkatan kualitas pendidikan	T2.1.1 Indeks Pendidikan	70,12 Poin (0-100)
	S2.1.1 Terwujudnya kualitas pendidikan yang merata	S2.1.1.1 Rata-rata Pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	100 %

VISI & MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4
	S2.1.2 Meningkatnya kompetensi literasi masyarakat	S2.1.2.1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15 Poin (0-100)

7.3 STRATEGI PADA MISI 3 MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN

Pencapaian sasaran pada misi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

Tabel 7.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

VISI & MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4
VISI : Mewujudkan Cilegon Baru Modern dan Bermartabat			
M3. Meningkatkan pelayanan kesehatan			
	T3.1 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	T3.1.1 Indeks Kesehatan	71,86 Poin (0-100)
	S3.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan individu	S3.1.1.1 Rata-rata Pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100 %

7.4 STRATEGI PADA MISI 4 MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA

Pencapaian sasaran pada misi Mewujudkan Kesejahteraan Yang Merata dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Tabel 7.4 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4 Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata

VISI & MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4
VISI : Mewujudkan Cilegon Baru Modern dan Bermartabat			
M4. Mewujudkan kesejahteraan yang merata			
	T4.1 Pemerataan kesejahteraan masyarakat	T4.1.1 Tingkat Kemiskinan	3,43 %
		T4.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	8 %
	S4.1.1 Berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat	S4.1.1.1 Persentase Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	57 %
	S4.1.1 Berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat	S4.1.1.2 Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	68,11 %
	S4.1.2 Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	S4.1.2.1 Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	30 %
	S4.1.2 Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	S4.1.2.2 Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	5 % Pertahun
	S4.1.3 Meningkatnya investasi dan pendapatan daerah	S4.1.3.1 Realisasi Investasi	10 Triliun Rupiah Pertahun
	S4.1.3 Meningkatnya investasi dan pendapatan daerah	S4.1.3.2 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6,5 % Pertahun

7.5 STRATEGI PADA MISI 5 MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERPERADABAN

Pencapaian sasaran pada misi Mewujudkan Masyarakat Berperadaban dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

Tabel 7.5 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 5 Mewujudkan Masyarakat Berperadaban

VISI & MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4
VISI : Mewujudkan Cilegon Baru Modern dan Bermartabat			
M5. Mewujudkan masyarakat berperadaban			
	T5.1 Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat	T5.1.1 Indeks Kebahagiaan	72,25 Poin (0-100)
	S5.1.1 Meningkatnya Kualitas Penataan ruang, infrastruktur kota, prasarana, sarana dan utilitas permukiman	S5.1.1.1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pekerjaan Umum	100 %
	S5.1.1 Meningkatnya Kualitas Penataan ruang, infrastruktur kota, prasarana, sarana dan utilitas permukiman	S5.1.1.2 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	26,57 %
	S5.1.1 Meningkatnya Kualitas Penataan ruang, infrastruktur kota, prasarana, sarana dan utilitas permukiman	S5.1.1.3 Rata-Rata capaian PSU permukiman dan sarpras perdagangan	98,29 %
	S5.1.1 Meningkatnya Kualitas Penataan ruang, infrastruktur kota, prasarana, sarana dan utilitas permukiman	S5.1.1.4 Rata-Rata capaian kinerja Pelayanan jalan dan transportasi	100 %
	S5.1.2 Meningkatnya pelestarian budaya dan destinasi wisata	S5.1.2.1 Persentase	71 %

VISI & MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4
		realisasi destinasi wisata	
	S5.1.2 Meningkatnya pelestarian budaya dan destinasi wisata	S5.1.2.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan	52,91 Poin
	S5.1.3 Mewujudkan Stabilitas Pangan,Ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan	S5.1.3.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,89 Poin (0-100)
	S5.1.3 Mewujudkan Stabilitas Pangan,Ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan	S5.1.3.2 Indeks Resiko Bencana	120 Poin
	S5.1.3 Mewujudkan Stabilitas Pangan,Ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan	S5.1.3.3 Persentase Penanganan Banjir	78,43 %
	S5.1.3 Mewujudkan Stabilitas Pangan,Ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan	S5.1.3.4 Tingkat stabilitas harga pangan dan bahan pokok	<10 % Pertahun

VISI & MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4
	S5.1.3 Mewujudkan Stabilitas Pangan,Ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan	S5.1.3.5 Rata-rata pencapaian kinerja SPM Trantibum Linmas	100 %
	S5.1.3 Mewujudkan Stabilitas Pangan,Ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan	S5.1.3.6 Indeks Kerukunan Umat Beragama	68,79 Point
	S5.1.4 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	S5.1.4.1 Tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan kewilayahan	20 %
	S5.1.5 Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak, pemuda dan olahraga	S5.1.5.1 Indeks perlindungan anak	70,85 Poin
	S5.1.5 Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak, pemuda dan olahraga	S5.1.5.2 Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk	0,88 %
	S5.1.5 Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak, pemuda dan olahraga	S5.1.5.3 Indeks Pembangunan Pemuda	49,04 Poin (0-100)
	S5.1.5 Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak, pemuda dan olahraga	S5.1.5.4 Indeks Pembangunan Gender	86,60 Poin (0-100)

BAB VIII
PENUTUP

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, diperlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran yang efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kota Cilegon segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Untuk menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024.

KUA-PPAS Kota Cilegon Tahun 2024 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Berakhirnya pandemi Covid-19 bukan berarti tantangan yang akan dihadapi menjadi semakin ringan. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemic Covid-19, menciptakan kompleksitas yang berat dalam beberapa tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 tidak hanya akan menjadi prestasi Lembaga Eksekutif secara sepihak, tetapi adalah hasil kerja bersama dengan DPRD Kota Cilegon bahkan seluruh lapisan masyarakat Kota Cilegon. Untuk itu kedua lembaga eksekutif dan legislatif bersepakat untuk memperkuat, untuk saling memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan sesuai Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Umum APBD Kota Cilegon Tahun 2024 merupakan dokumen publik yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Kota Cilegon Tahun 2024, antara pihak Eksekutif dan Legislatif.

Cilegon, Juli 2023 Walikota Cilegon,

TTD

H. HELLDY AGUSTIAN, SE, SH, MH